

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara anggota ASEAN pertama yang meratifikasi Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama (PCA) dengan Uni Eropa pada 9 November 2009, berlaku mulai 1 Mei 2014 (Supamijoto, 2014). Perjanjian tersebut menjadi payung hukum dan politik bagi hubungan bilateral antara Uni Eropa dengan negara berkembang seperti Indonesia. PCA dapat mengakomodasi dialog keamanan dan politik yang cukup luas, kerja sama di bidang perdagangan, serta upaya untuk memperkuat hubungan antar-masyarakat melalui kemudahan mobilitas, program pendidikan, dan pertukaran budaya (EEAS, 2017).

Pada masa itu, Indonesia sebagai negara berpenghasilan rendah-menengah, masih mendapatkan privilese berupa tarif rendah untuk sejumlah komoditas ekspornya di bawah skema EU *Generalized Scheme of Preferences* (GSP). Namun, hak istimewa ini sudah tidak bisa dinikmati lagi oleh Indonesia. Sebab pada 10 Februari 2020, *World Trade Organization* (WTO) telah mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. Indonesia dinilai layak dicap sebagai negara maju dalam hal perdagangan global. Hal ini berdampak pada akselerasi ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia berupa kerajinan tangan dan minyak atsiri ke Eropa dalam tiga tahun belakangan ini yang dipastikan lesu (*Observatory of Economic Complexity*, 2023). Oleh karena itu, negosiasi Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) yang dimulai pada 18 Juli 2016 oleh Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perdagangan Republik Indonesia saat itu, dan Cecilia Malmström, Komisaris Perdagangan Uni Eropa, menjadi kian krusial untuk segera diratifikasi demi mengembalikan stabilitas neraca perdagangan luar negeri Indonesia ke Uni Eropa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).

Indonesia termasuk salah satu negara penghasil utama minyak atsiri di dunia. Terdapat kurang lebih 15 jenis minyak atsiri asli Indonesia yang sudah menjadi komoditi ekspor yaitu minyak sereh wangi (*Citronella oil*), minyak akar wangi (*Vetiver oil*), minyak nilam (*Patchouli oil*), minyak kenanga (*Cananga oil*), minyak cendana (*Sandalwood oil*), minyak pala dan fuli (*Nutmeg and Mace oil*), minyak daun, gagang dan bunga cengkeh (*Clove leaf, stem, bud oil*), minyak lawang (*Cullilawan oil*), minyak massoi (*Massoi oil*), minyak jahe (*Ginger oil*), minyak lada (*Black pepper oil*), minyak gaharu (*Agarwood oil*),

minyak terpentin (*Turpentine oil*), minyak kayu putih (*Cajeput oil*) minyak daun jeruk purut (*Kafir lime oil*), sementara di pasar Internasional terdapat 90 jenis minyak atsiri diperdagangkan. Perkembangan minyak atsiri di Indonesia selaras dengan permintaan pasar dunia yang kian meningkat. Minyak atsiri dibutuhkan sebagai bahan baku industri parfum, kosmetika, kesehatan, hingga makanan. Berikut adalah daftar negara-negara Uni Eropa importir minyak atsiri Indonesia beserta kuantitas arus komoditas pertahunnya:

Tahun	<i>France</i>	<i>United Kingdom</i>	<i>United States</i>	<i>Germany</i>
2010	11.059.650	4.114.483	25.718.395	7.642.177
2011	15.270.248	4.838.995	39.255.495	8.180.774
2012	4.619.020	1.838.981	28.009.998	4.491.835
2013	6.784.702	1.270.554	21.476.496	2.542.782
2014	4.266.142	1.520.571	21.107.119	1.983.778
2015	4.783.807	1.029.782	18.138.278	3.963.998
2016	4.701.730	1.124.611	16.458.231	2.254.871
2017	15.447.905	4.351.489	23.687.496	3.807.803
2018	19.551.142	3.507.047	28.098.574	4.227.016
2019	11.697.789	4.162.143	23.798.282	2.874.242
2020	12.475.845	4.431.708	25.212.831	4.375.330
2021	13.137.975	4.965.133	28.200.262	3.241.406
2022	2.714.544	1.238.863	6.501.975	1.241.285

Dianalisis dari Sumber: <https://comtradeplus.un.org>, 2023

**Tabel 1. Ekspor Minyak Atsiri**

Fenomena ini mendorong terjadinya fluktuasi harga di level produsen hulu, seperti halnya yang dialami petani minyak atsiri nilam di Dataran Tinggi Bulan dan Takengon, dua wilayah yang sangat diakui kualitas rendemen minyak nilamnya oleh dunia. Dalam penelitian lapangan, saya mendapati tendensi para petani di Dataran Tinggi Bulan yang putus asa dikarenakan harga minyak atsiri nilam yang terus menerus anjlok yang mendorong pada keinginan untuk kembali mendulang logam mulia di pedalaman hutan lindung Tojo Una-Una meski itu sangat berbahaya.

Perancis merupakan salah satu negara tujuan ekspor minyak atsiri nilam Indonesia. Sejumlah ekspor unggulan Indonesia, termasuk minyak atsiri nilam memiliki pasar potensial di Perancis. Minyak nilam beserta produk turunannya merupakan komoditas yang diminati oleh industri makanan dan kecantikan di Prancis dan dunia. Tingginya permintaan minyak atsiri ke Prancis selama ini disebabkan oleh fakta bahwa kota Paris adalah kota mode dunia. Prancis adalah salah satu negara industri kecantikan yang

mendominasi pangsa pasar kosmetik global sebesar 23%. Nilai ekspornya pun kian menguat dengan pertumbuhan sebesar 5% selama periode 2010-2018, sementara pasar dunia mengalami pertumbuhana rata-rata 4% pertahun selama periode yang sama. Fakta ini kian dikuatkan dari hasil studi FEBEA (*Federation of Beauty Enterprises*) yang mengukuhkan posisi Prancis sebagai eksportir kosmetik terbesar di dunia pada 2018 (V.G., 2019).

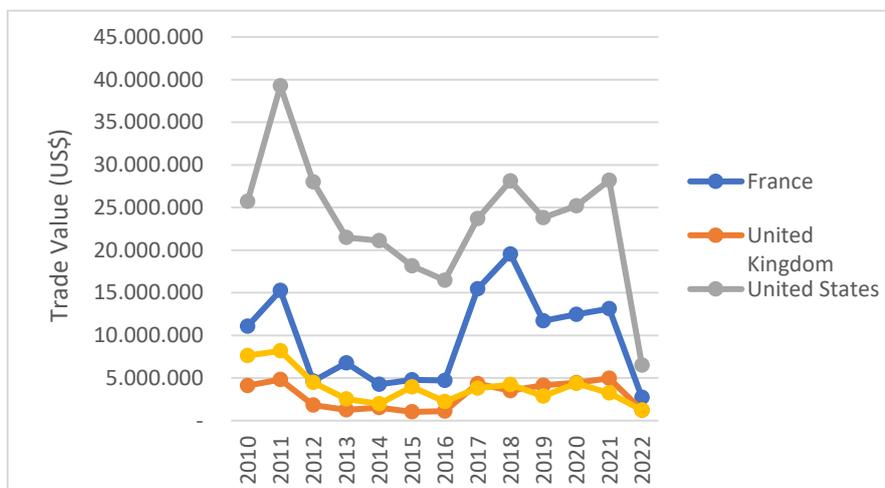
Sebagai bagian penting dari Uni Eropa, Prancis merupakan salah satu negara utama yang menjadi importir minyak atsiri nilam Indonesia. Nilam diekspor dalam bentuk rendemen minyak atsiri atau bahan olahan lainnya yang digunakan dalam industri makanan, minuman, dan parfum di Prancis. Indonesia menempati peringkat ke-9 sebagai negara eksportir minyak atsiri dunia periode 2015-2021 (UN Comtrade, 2022). Fakta ini berkaitan erat dengan kondisi industri kecantikan domestik Prancis dan juga dunia yang kian berkembang tiap tahunnya (Christian Dior, 2020). Gambar 2 menunjukkan perkembangan kuantitas ekspor minyak atsiri nilam Indonesia ke Prancis sejak tahun 2010 hingga 2022.



**Gambar 1. Tanaman Herbal Nilam**

Nilam memiliki aroma yang sangat kuat sehingga menjadikannya bahan esensial wewangian eksklusif. Nilam biasanya diekstrak dengan metode destilasi uap dari daun sampai akarnya yang dipanen dan dikeringkan untuk kemudian diambil rendemennya. Nilam termasuk 10 komoditas perkebunan unggulan Indonesia di tahun 2018 yang dapat diolah menjadi minyak atsiri yaitu zat berbau yang terkandung dalam tanaman, minyak atsiri paling sering digunakan sebagai aromaterapi dengan berbagai khasiat dan memiliki potensi besar untuk diekspor (Dewan Atsiri Indonesia, 2018).

Menurut Dewan Atsiri Indonesia, minyak atsiri memiliki banyak sekali manfaat dalam industri kecantikan dan makanan-minuman, minyak nilam banyak digemari sebab ia memiliki 3 karakter utama yang menjadi incaran industri kecantikan dan makanan-minuman eksklusif, yang berasal dari kandungan utamanya, yaitu *Patchouli Alcohol* sebagai zat pewangi (*frangrances*), zat pengikat bau (*fixative*) dalam parfum, dan penyedap (*flavoring agent*) dalam bahan pangan dan minuman (Kedubes RI Bern, 2020). Dari sekian banyak jenis minyak atsiri yang diproduksi di Indonesia seperti cengkeh, pala, serai wangi, jahe, cendana, akar wangi, kayu manis, melati, kayu putih, dan kenanga, nilam-lah yang memiliki daya saing dan produksi paling dipertimbangkan di pasar internasional.



Dianalisis dari Sumber: <https://comtradeplus.un.org>

**Gambar 2. Grafik intensitas ekspor minyak Atsiri 2010-2022**

Minyak atsiri adalah produk pertanian olahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sebagian besar tandon minyak atsiri di Eropa diproses oleh industri makanan yaitu makanan beku, produk olahan susu, roti, manisan, daging, makanan dan minuman ringan. Selebihnya, minyak nilam digunakan sebagai bahan baku esensial dalam parfum, produk perawatan kulit, rambut, kecantikan, dan lainnya. Dari segmen ini, sebesar 25% penggunaan minyak atsiri terbesar di Eropa adalah untuk perlengkapan mandi, perawatan kulit dan rambut, disusul oleh parfum 15% dan produk kecantikan sebesar 10% (Kedubes RI Bern, 2020).

Prospek ekspor minyak atsiri nilam di masa depan kian menjanjikan, seiring dengan meningkatnya permintaan pasar terhadap produk wewangian dan kosmetik, trend mode dan kurangnya pengembangan bahan alternatif di industri ini (Purwandari, et al., 2016). Selain itu, permintaan pasar dunia akan minyak nilam adalah sebesar 120.000-140.000 ton

per tahun sedangkan volumenya terus meningkat, sementara produksi global akan minyak nilam baru mencapai 100.000 ton per tahun (Mangun, 2009). Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Indonesia menduduki peringkat ke enam sebagai produsen minyak atsiri nilam di dunia yang memproduksi 6.500 ton per tahun atau setara 6.5% dari total perdagangan dunia (Kemenper RI, 2019). Peningkatan produktivitas minyak nilam Indonesia selama periode 2015-2019 juga mengalami rata-rata peningkatan sebesar 6,82% per tahun nya.

Berdasarkan data dari UN Comtrade, adapun negara-negara produsen minyak atsiri nilam yang turut serta mendominasi pangsa pasar di Uni Eropa mneyaingi Indonesia adalah Meksiko (peringkat 8), Brazil (peringkat 1), dan disusul Amerika Serikat (peringkat 2). Negara-negara inilah yang menjadi kekhawatiran utama para stakeholder minyak atsiri nilam Indonesia. Sebab dengan lesunya distribusi minyak atsiri nilam lokal dalam sirkulasinya di pasar Eropa, maka dominasi pangsa pasar yang selama ini telah dipegang kuat oleh Indonesia akan bergeser (Huda, et. al., 2021). Meski menurut Turukay (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa volume ekspor produk komoditas yang tinggi tidak menjamin daya saing komparatif dan kompetitifnya untuk menggeser dominasi pangsa pasar, seperti halnya yang dikhawatirkan Indonesia.

Pada faktanya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam melakukan spesialisasi produksi dan ekspor minyak nilam, diantaranya adalah memiliki luas areal produksi terbesar di Asia Tenggara yakni mencapai 17.400 hektar pada tahun 2021 (BPS RI, 2022). Sumber daya komoditas nilam penghasil minyak atsiri nilam dapat dengan mudah dijumpai di hampir sebagian besar wilayah Indonesia terutama di sentra-sentra penghasil minyak atsiri nilam yang karakter tanah dan iklimnya cocok untuk budidaya nilam, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan beberapa wilayah di Jawa. Adapun kemungkinan bahwa akan ada beberapa wilayah baru yang dapat dikembangkan sebagai sentra penghasil minyak atsiri nilam demi menguatkan mata rantai pasokan ekspor minyak atsiri nilam ke luar negeri. Kondisi faktual ini menjadi jaminan produktivitas minyak atsiri nilam secara berkelanjutan.

Namun dengan daya tawar sebegitu besarnya, Indonesia masih belum bisa memenuhi permintaan pasar Prancis sebagai konsumen paling potensial akan minyak atsiri nilam. Beberapa penyebab itu misalnya terkait banyaknya prosedur keamanan dan kesehatan yang sulit untuk dipenuhi oleh produsen minyak nilam di Indonesia yang mayoritasnya masih menggunakan cara-cara tradisional (Huda, et al., 2021). Sedangkan

para *stakeholders* di Indonesia tampak kurang berintensitas untuk memodernisasi instrumen serta praktik produksi minyak atsiri nilam tanpa keterlibatan investor. Di lain hal, peluang untuk meningkatkan nilai perdagangan Indonesia akan minyak nilam ke Prancis sangat besar.

Ditambah meskipun kedua negara saling berjauhan secara geografis, Indonesia dan Prancis menyadari bahwa keduanya saling membutuhkan satu sama lain demi mencapai komplementaritas terbaiknya, khususnya sebagai mitra perdagangan global. Kedua negara menyadari pentingnya akan adanya suatu wadah yang dapat menjadi tempat bagi kedua belah pihak untuk merundingkan kerja sama ekonomi yang lebih mapan dibandingkan PCA. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia akan terus mendorong upaya peningkatan kapasitas ekspor minyak atsiri nilam lokal ke Prancis melalui cara-cara diplomatis yang dinilai paling pragmatis dengan tetap mengedepankan paradigma kepentingan nasionalnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah memahami potensi ekspor minyak atsiri nilam Indonesia di pasar global, terkhusus pada pangsa pasar Prancis yang terkenal sebagai produsen wewangian terbaik di dunia, maka timbul pertanyaan: Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas ekspor minyak atsiri nilam lokal ke Prancis?

## **C. Kerangka Berpikir**

Sejak awal, orientasi dari teori-teori dalam kajian hubungan internasional (HI) adalah untuk mempelajari sebab-akibat serta kondisi-kondisi yang menciptakan kerja sama antar aktor HI. Maka dari itu, penulis memilih menggunakan teori kerja sama internasional dan konsep diplomasi ekonomi untuk dapat memahami lebih baik intensi penginisiasian IEU CEPA yang dimulai Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa sebagai salah satu upaya diplomatis dalam meningkatkan kapasitas ekspor minyak atsiri nilam Indonesia ke Prancis.

### **Teori Kerja Sama Internasional**

Kerja sama dapat muncul sebagai hasil adaptasi perilaku suatu aktor dalam menanggapi atau mengantisipasi pilihan yang dibuat oleh aktor lain, begitupun juga dengan perubahan lingkungannya. Lebih tegas lagi, teori kerja sama internasional

dimaknai oleh Pfaltzgraff (1997) dalam bukunya berjudul *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey* sebagai berikut:

Kerja sama dapat dimaknai sebagai rangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada paksaan dan dilegitimasi secara hukum, seperti halnya dalam organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor negara membangun hubungan kerja sama melalui organisasi internasional dan lembaga internasional, yang diinterpretasi sebagai seperangkat aturan, norma, dan prosedur konsensus yang disepakati, di mana harapan para aktor dan kepentingan negara bertemu dalam lingkup hubungan internasional (Pfaltzgraff, 1997:418- 419).

Sejatinya, kerja sama dapat tumbuh dari komitmen individu atau suatu negara atas visi kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi masing-masing aktor. Kunci dari sikap kooperatif ada pada sejauh mana masing-masing aktor percaya bahwa pihak lain akan bekerja sama. Oleh karena itu, Xinyuan (2010) dalam jurnalnya berjudul *International Cooperation Theory and International Institutions* menekankan bahwa konstruksi utama dari teori kerja sama pada awalnya tidak hanya didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi antar individu melainkan antar entitas kolektif, termasuk perusahaan, partai politik, organisasi etnis, kelompok teroris, dan negara bangsa.

Fenomena ini terjadi disebabkan oleh keterbatasan suatu individu atau negara untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut Kartasasmita (1977), kerja sama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan penambahan kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Keohane (2015) turut melegitkan teori tersebut dengan menyebutkan bahwa sesungguhnya, hubungan interdependensi antar aktor internasional membawa pengaruh yang signifikan pada intensitas terciptanya hubungan kerja sama. Sebab ia percaya bahwa kerja sama internasional terjalin ketika ada suatu aktor mencoba menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi aktual atau yang diantisipasi dari aktor lainnya maupun sebagai respon terhadap perubahan lingkungannya.

Adapun Immanuel Kant (1989) dalam bukunya *Perpetual Peace* mendukung pendekatan liberalisme yang percaya bahwa rasionalitas individu, terlepas dari sifat egoisnya, dapat saling bekerja sama dalam situasi yang menciptakan suatu keharusan, sebab negara liberal cenderung pasifis. Terlebih dalam perspektif neoliberalisme, keinginan aktor HI untuk bebas dan sejahtera akan mendorong mereka kepada konsensus

yang membuka ruang-ruang bagi perdagangan internasional demi menciptakan sebuah komplementaritas yang saling menguntungkan.

Dalam konteks hubungan internasional, maka aktor pribadi atau individu akan dimanifestasi sebagai aktor berentitas negara, baik perangkat pemerintahan ataupun aktor yang berasal dari pihak MNC (*multi-national corporation*) lainnya. Aktor-aktor atas nama negara itu akan berusaha agar kepentingan tujuan negaranya dapat tercapai dengan baik saat membangun relasi dan kerjasama dengan aktor lainnya. Sebab pada hakikatnya, kerjasama internasional dapat menjadi payung hukum dengan spektrum yang luas meliputi kerjasama dalam bidang politik, sosial, pertahanan, ekonomi, dan kebudayaan yang merujuk pada politik luar negeri masing-masing aktor.

Menurut K. J. Holsti (1992) dalam bukunya yang berjudul *International Politics, A Framework for Analysis*, ada beberapa alasan mengapa suatu negara melakukan kerjasama sama dengan negara lainnya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
- b. Meningkatkan efisiensi dalam pengurangan biaya (tarif).
- c. Adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
- d. Mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan suatu negara yang berdampak terhadap negara lain.

Sedangkan menurut Koesnadi Kartasasmita (1977) yang mengatakan dalam bukunya berjudul *Administrasi Internasional* bahwa adanya suatu kerjasama internasional, didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kemajuan di bidang teknologi yang memudahkan hubungan antar negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu sama lain.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan suatu bangsa dan negara.
3. Trauma pasca perang di mana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri.
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi antara kedua belah pihak.

Kerjasama internasional adalah wujud dari hubungan antar aktor HI yang tujuannya didasarkan pada kepentingan nasionalnya masing-masing yang di dalamnya terdapat seperangkat aturan, prinsip, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional (Krasner, 1982). Selain itu, negara-negara yang saling menjalin kerjasama internasional dapat dipastikan memiliki kepentingan bersama. Dalam

konteks ini, kerja sama internasional menjadi dasar perdagangan bebas yang kian memudahkan negara yang terlibat untuk menciptakan komplementaritasnya.

Dalam melakukan kerja sama, ada dua syarat utama yang harus terpenuhi, yaitu: *pertama*, kewajiban menghormati kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat kerja sama. *Kedua*, adanya konsensus dalam upaya mengatasi masalah yang timbul saat kerja sama berlangsung. Kerja sama internasional di bidang ekonomi itu sendiri mencakup seluruh kegiatan perekonomian antar negara dan individu dari satu negara ke negara lain. Pada dasarnya, kerja sama antara dua negara atau lebih adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kepentingan para aktor yang terlibat.

Adapun menurut Yanuar Ikbar (2014), kerja sama internasional dapat termanifestasi dalam tiga bentuk yaitu: *pertama*, kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua negara. Kerja sama yang dilakukan biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, pendidikan dan kebudayaan. *Kedua*, kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan. Kerja sama tersebut dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi dan pertahanan. *Ketiga*, kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara secara global dengan spektrum yang luas, contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan kerangka teori di atas, intensi peningkatan kapasitas perdagangan global minyak atsiri nilam lokal yang dilakukan Pemerintah Indonesia menjadi bukti faktual bagaimana sebuah relasi kerja sama internasional berawal. Minyak atsiri nilam tidak hanya akan menjadi komoditas perdagangan ekspor-impor saja, tetapi di dalamnya sarat dengan penghargaan kepentingan nasional dan negosiasi atas keputusan bersama dari negara yang menjalin kerja sama perdagangannya. Dengan kondisi seperti itu, perangkat negara terkait beserta para *stakeholders* di dalamnya akan terus berusaha membangun relasi dan komunikasi yang baik demi memuluskan perdagangan global minyak atsiri nilam lokal, di mana di dalamnya juga akan tercapai tujuan peningkatan kesejahteraan bagi siapapun yang terlibat dalam prosesnya dari hulu hingga hilir, terkhusus bagi para petani nilam lokal.

### **Konsep Diplomasi Ekonomi**

Salah satu definisi diplomasi ekonomi mengatakan: *Economic diplomacy is the process through which countries tackle the outside world, to maximize their national gain in all the fields of activity, including trade, investment and other forms of economically beneficial exchanges, where they enjoy comparative advantage; it has bilateral, regional and multilateral dimensions, each of which is important* (Rana, 2004). Dari definisi ini

jelas terlihat bahwa unsur perdagangan internasional dan investasi menjadi perhatian utama. Penekanan pada isu perdagangan internasional dan investasi mudah dipahami karena kemajuan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari kinerja negara tersebut dalam meningkatkan volume perdagangan internasional dan jumlah investasi asing yang masuk ke dalam perekonomiannya demi mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam memenuhi kebutuhan pembangunan ekonominya setiap negara harus berhubungan dengan negara atau perusahaan asing untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Perdagangan internasional menurut kaum liberal terjadi karena tidak ada satupun negara yang *self-sufficient* dan oleh karena itu harus menjalin perdagangan internasional guna menentukan alokasi sumber daya ekonomi yang paling efisien demi mencari keuntungan yang tertinggi (*the most profitable location of economic activities*). Dengan demikian dalam pemikiran kaum liberal, efisiensi dalam produksi dan perdagangan internasional menjadi poin penting. Seandainya dengan mengimpor, suatu negara dapat lebih diuntungkan daripada memproduksi sendiri suatu komoditas, maka terjadilah perdagangan internasional yang berproses berdasarkan konsep *comparative advantage* dan *competitive advantage* (Lairson, 1997).

Atas dasar inilah kaum liberal mempromosikan perdagangan bebas (*free trade*) dengan mengurangi atau bahkan meniadakan *tariff and non-tariff barriers* antar negara. Dengan demikian maka semua aktor dalam *free trade* akan diuntungkan dari praktik perdagangan tersebut menurut tingkat daya saing masing-masing. Yang menjadi persoalan adalah dalam kenyataannya, daya saing nasional setiap negara tidak sama sehingga *absolute gain* dari perdagangan internasional untuk setiap negara juga timpang. Maka dari itu, sebagai rangka peningkatan kinerja diplomasi ekonomi sesuai definisi yang menjadi acuan di atas, maka perlu dicermati secara konseptual faktor-faktor yang menentukan keberhasilan diplomasi ekonomi suatu negara. Dalam buku yang berjudul *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in international Economic Relations*, Stephen Woolcock (2011) menyebutkan ada beberapa faktor penting yang harus diperhitungkan tatkala sebuah negara ingin meningkatkan kinerja diplomasi ekonomi baik melalui perundingan perdagangan maupun investasi.

Faktor yang pertama adalah *relative economic power*. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam lembaga kerjasama perdagangan multilateral atau global seperti WTO besaran kekuatan ekonomi negara anggota berbeda-beda mulai dari negara-negara industri maju, *emerging markets* (BRICS) dan negara-negara berkembang lainnya. Faktor ini menentukan *bargaining power* masing-masing anggota dengan kepentingan yang

berbeda-beda, sehingga untuk memenangkan suatu perundingan mereka perlu melakukan pembentukan kelompok berdasarkan persamaan kepentingan.

Faktor yang kedua yang membentuk diplomasi ekonomi adalah *international institutions or regimes* (lembaga dan pengaturan internasional). Mengutip definisi dari Stephan Krasner, yang dimaksud dengan *international regimes* adalah *principles, norms, and decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue area* (Krasner, 1990). Selanjutnya dikatakan bahwa *international regimes* berfungsi mencegah agar pihak-pihak yang melakukan kerja sama tidak melakukan kecurangan serta membuat mereka paham tentang kepastian implementasi kerjasama tersebut.

Faktor yang ketiga adalah kondisi pasar atau *markets*. Yang dimaksud di sini adalah dua hal penting yaitu globalisasi keuangan dan globalisasi produksi. Gejolak pasar uang global sangat memengaruhi kebijakan fiskal dan moneter suatu negara dan demikianpun sebaliknya. Bagaimana suatu negara mengurangi dampak negatif dari gejolak yang ada di pasar uang sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut serta kredibilitasnya di mata negara-negara donor dan investor asing. Sedangkan globalisasi produksi mendorong suatu negara untuk melakukan *positioning* dalam *global supply chain* agar memperoleh nilai tambah yang tinggi dari produk eksportnya. Dalam hal ini dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang handal sangat dibutuhkan mengingat komoditas sumber daya alam saja tidak cukup untuk mengubah suatu perekonomian dari status negara berkembang menjadi negara maju. Dalam konteks ini diplomasi ekonomi tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh aktor negara atau pemerintah, tetapi produsen swasta yang menguasai teknologi produksi, jejaring yang luas serta pengalaman dalam globalisasi produksi.

Faktor keempat yang memengaruhi diplomasi ekonomi terkait perdagangan dan investasi adalah persaingan kepentingan dalam negeri. Dalam kondisi yang ideal pemerintah harus mengakomodasi semua kepentingan kelembagaan dari birokrasi pemerintahan serta mengsinergikan kepentingan negara dan swasta. Dalam kenyataannya kondisi yang ideal ini sulit dicapai dan tidak jarang terjadi konflik kepentingan yang pada gilirannya dapat merugikan misi diplomasi ekonomi secara keseluruhan. Apalagi jika pemerintah tidak memiliki *blueprint* diplomasi ekonomi untuk mengantisipasi arus liberalisasi perdagangan di tingkat regional maupun global. Maka dari itu dalam konteks ini sangat dibutuhkan *policy alignment* dalam implementasi diplomasi ekonomi suatu negara sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan *conflict of interests* antar-instansi.

Faktor kelima yang memengaruhi substansi dan implementasi diplomasi ekonomi adalah ide-ide yang berasal dari para *stakeholders*. Menteri Perdagangan yang pro-liberalisasi akan cenderung mempromosikan perjanjian perdagangan bebas sedangkan pejabat pemerintah lainnya yang pro-industri dalam negeri akan cenderung bersikap hati-hati dan memilih untuk membatasi liberalisasi perdagangan dan investasi.

Kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas bertujuan untuk mempermudah analisis atau kajian tentang kinerja diplomasi ekonomi Indonesia dengan memperhitungkan lingkungan internasional dan domestik yang harus dihadapinya dalam upaya meningkatkan kapasitas ekspor minyak atsiri nilam lokal ke Prancis.

#### **D. Hipotesis**

1. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kapasitas ekspor minyak atsiri nilam lokal ke Prancis dengan menginisiasi kerjasama internasional IEU-CEPA (*Indonesia-European Union Ceomprehensive Economic Partnership*) bersama Pemerintah Uni Eropa.
2. Pemerintah Indonesia menekankan adanya serangkaian instrumen dan skema kebijakan pada poin-poin esensial IEU-CEPA yang dapat menstimulus modernisasi kapasitas produksi dalam negeri serta mengakselerasi arus perdagangan global minyak atsiri nilam Indonesia ke Uni Eropa, khususnya Prancis.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kapasitas ekspor minyak atsiri lokal nilam ke Prancis.
2. Mengelaborasi bentuk-bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mencapai kesepakatan kerjasama internasional bersama Uni Eropa.

#### **F. Metodologi**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan *library research* atau penelitian kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya. Sehingga skripsi ini akan mengandung data yang valid dan kohesi, baik melalui media cetak maupun digital, yaitu dari berbagai sumber seperti buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, makalah ilmiah, surat kabar, dan laporan resmi dari Biro

Statistik Indonesia, Prancis, dan organisasi-organisasi Internasional sektor perdagangan lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Sebagai pembatas agar penelitian ini tetap koheren, maka peneliti hanya akan menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan peningkatan kapasitas ekspor minyak atsiri nilam lokal Indonesia ke Prancis melalui perundingan IEU CEPA. Peneliti juga memfokuskan jangka waktu data yang dikaji mulai dari tahun 2010 sampai 2022. Sebab permintaan industri di Uni Eropa akan minyak nilam pada tahun 2010 meningkat drastis hingga saat ini. Dan pada 2016, perundingan IEU CEPA sudah mulai diinisiasi guna memperlancar dan menstimulus kegiatan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab, antara lain:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas dinamika hubungan perdagangan global minyak atsiri nilam antara Indonesia dan Prancis dari hulu hingga hilir.

Bab III menjelaskan tentang bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor minyak atsiri nilam lokal ke Prancis dengan mendorong terbentuknya jalinan kerja sama internasional antara Indonesia dengan Uni Eropa melalui IEU CEPA.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi bab yang telah dipaparkan.